



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI XII DPR RI
(BIDANG: ESDM, LINGKUNGAN HIDUP, DAN INVESTASI)**

Tahun Sidang	: 2025 – 2026
Masa Persidangan	: II
Rapat	: Ke – 18 (Delapan belas)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan	: Dirjen Migas KESDM RI, Kepala BPH Migas, Bupati Tapanuli Tengah, Bupati Manokwari, Bupati Bintuni dan Bupati Ogan Komering Ilir
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 24 November 2025
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s.d 13.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi XII DPR RI Gd. Nusantara I Lantai 1
Acara	: 1. Dugaan penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran di Tapanuli Tengah 2. Kuota BBM solar di daerah 3. Lain-lain
Ketua Rapat	: Dr. Bambang Patijaya, S.E., M.M (Ketua Komisi XII DPR RI/ Fraksi Partai Golkar)
Sekretaris Rapat	: Dwiyanti, S.Sos.
Hadir	: A. Pemerintah - Kepala BPH Migas - Direktur Teknik dan Lingkungan Migas KESDM RI - Bupati Ogan Komering Ilir - Wakil Bupati Manokwari B. 17 Orang Anggota dari 45 Orang Anggota Komisi XII DPR RI terdiri dari: 17 Orang Anggota Komisi XII DPR RI hadir fisik 28 Orang Anggota Komisi XII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI pada hari Senin, 24 November 2025 dibuka pukul 11.45 WIB, dipimpin oleh Dr.Bambang Patijaya, S.E., M.M selaku Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan agenda pembahasan :
 - Dugaan penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran di Tapanuli Tengah
 - Kuota BBM solar di daerah
 - Lain-lain

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi XII DPR RI mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala BPH Migas, Bupati Manokwari, dan Bupati Ogan Komering Ilir untuk bekerjasama meningkatkan pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) agar lebih tepat sasaran sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
2. Komisi XII DPR RI mendukung Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Kepala BPH Migas untuk memberikan sanksi tegas kepada SPBU dan badan usaha lainnya yang berpotensi melakukan penyelewangan pendistribusian JBT dan JBKP.
3. Komisi XII DPR RI meminta Kepala BPH Migas untuk mengatur pemerataan kuota JBT di SPBU agar tidak terjadi kelangkaan bagi masyarakat.
4. Komisi XII DPR RI mendukung usulan Bupati Ogan Komering Ilir dan Bupati Manokwari terkait penambahan infrastruktur SPBU, SPBN, dan jargas di daerah masing-masing.
5. Komisi XII meminta Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala BPH Migas, Bupati Manokwari, dan Bupati Ogan Komering Ilir untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan maupun tanggapan Anggota Komisi XII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 1 Desember 2025.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 24 November 2025

KEPALA BPH MIGAS

KETUA RAPAT,

T.T.D

T.T.D

WAHYUDI ANAS

Dr. BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M

A-289

**DIREKTUR TEKNIK DAN
LINGKUNGAN MIGAS**

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

T.T.D

T.T.D

NOOR ARIFIN MUHAMMAD

H. MUCHENDI MAUZAREKI

WAKIL BUPATI MANOKWARI

T.T.D

H. MUGIYONO